

Citra Arok dalam *Arok Dedes* Karya Pramoedya Ananta Toer

Lee Eun Kyung

Hankuk University of Foreign Studies

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggambaran tokoh Ken Arok dalam novel *Arok Dedes* karya Pramoedya Ananta Toer serta mengungkap pesan utama yang disampaikan pengarang melalui tokoh tersebut. Secara historis, Ken Arok kerap dipandang sebagai simbol perebutan kekuasaan. Namun, Pramoedya merekonstruksi sosok Arok sebagai pemimpin ideal yang memperjuangkan keadilan dan nilai persatuan. Arok digambarkan sebagai simbol integrasi yang mampu menciptakan harmoni dalam masyarakat plural, serta sebagai tokoh yang mengupayakan terwujudnya komunitas yang setara melalui penghapusan perbudakan. Representasi ini mencerminkan kritik Pramoedya terhadap ketiadaan figur pemimpin yang mampu mempersatukan bangsa di Indonesia. Ia menekankan bahwa kemampuan untuk merangkul dan menyatukan keberagaman merupakan prasyarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam konteks masyarakat yang majemuk.

KEYWORDS

Pramoedya Ananta Toer, novel sejarah, *Arok Dedes*, Ken Arok, reinterpretasi (tokoh) Sejarah



©2025 The Author(s).
Published by UPT.
Penerbitan LP2MPP
Institut Seni Indonesia
Denpasar. This is an
open-access article
under the [CC-BY-NC-SA](#)
license.

Pendahuluan

Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya disebut Pramoedya) adalah sastrawan Indonesia yang selama hidupnya telah beberapa kali dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Nobel Sastra. Karya besarnya, Tetralogi *Bumi Manusia*, telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit berpengaruh di dunia, *Penguin Random House*, dan banyak karyanya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa dan dikenal luas di dunia sastra. Pramoedya, yang lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora dan meninggal dunia pada 30 April 2006 di Jakarta, mengalami banyak peristiwa sejarah yang meresahkan Indonesia seperti penjajahan Belanda dan Jepang, kemerdekaan dan revolusi Indonesia, serta peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dipenjarakan selama perjuangan revolusi pada tahun 1947 karena melawan Belanda, dipenjarakan karena bukunya *Hoakiau di Indonesia* dianggap mendukung komunitas Tionghoa, dan dipenjarakan di Pulau Buru selama 14 tahun di bawah rezim Suharto atas tuduhan terlibat dengan Partai Komunis ketika peristiwa 1965 meletus. Selama masa pembuangannya di Pulau Buru, ia menulis karya agungnya yang dianggap sebagai mahakarya sastra Indonesia modern, Tetralogi *Bumi Manusia*.

Salah satu kata kunci yang sering muncul dalam karya-karya Pramoedya adalah ‘sejarah’. Hal ini karena novel-novel utamanya berhubungan dengan sejarah. Karya-karya tersebut meliputi Tetralogi *Bumi Manusia* (1980-1988) yang membahas tentang munculnya kesadaran nasional dengan latar belakang masa kolonial Belanda di awal abad ke-20, *Arus Balik* (1995) yang menceritakan kedatangan Portugis ke Indonesia pada abad ke-16 dan jatuhnya kekuatan maritim di nusantara, *Arok Dedes* (1999) yang menggambarkan kisah Ken Arok dan awal mula berdirinya Kerajaan Singasari, serta *Mata Pusaran* yang membahas tentang jatuhnya Kerajaan Majapahit, kerajaan maritim terkuat dalam sejarah Indonesia.¹

Pramoedya juga menafsirkan kembali tokoh dan peristiwa sejarah dalam berbagai genre, seperti *Drama Mangir* (2000) yang menggambarkan berdirinya Kerajaan Mataram; *Sang Pemula* (1985) yang menuliskan biografi R.M. Tirta Adi Suryo, pelopor pergerakan nasional; dan *Panggil Aku Kartini Saja* (1962), biografi tentang R.A. Kartini. Selain itu, Pramoedya pernah mengajar sastra dan sejarah di Universitas Res Publika pada tahun 1960-an. Mengenai sejarah, ia berpendapat bahwa “sejarah adalah cermin yang paling jernih dan referensi yang paling dapat diandalkan untuk membangun masa depan yang lebih baik”. Kesadaran tentang sejarah ini terungkap dengan baik dalam upaya naratifnya untuk merefleksikan sejarah Indonesia secara kritis, memandang masa kini, dan membayangkan masa depan Indonesia melalui sastra. Oleh karena pandangannya inilah Pramoedya juga dinilai sebagai sastrawan yang membuka cakrawala baru bagi novel-novel sejarah dalam dunia sastra Indonesia. Peneliti sastra Indonesia berkebangsaan Korea Selatan, Koh Young-hun [3], menyebut Pramoedya sebagai ‘penulis yang berusaha menata kembali simpul-simpul sejarah’ [4, hlm. 123-128].

Arok Dedes merupakan novel sejarah Pramoedya yang ketiga yang diselesaikannya ketika berada di Pulau Buru pada tahun 1976 dan diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini menggambarkan Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Arok merupakan tokoh sejarah nyata yang terbentuk dari persilangan antara sejarah kuno dan mitologi, dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Indonesia dalam hal asal-usulnya, cara perebutan kekuasaan, dan moralitasnya. Mengenai asal-usul Ken Arok, terdapat beberapa penafsiran. Dalam literatur seperti Kitab Pararaton dan Katuturanira Ken Arok, yang menceritakan kisah raja-raja Singasari dan Majapahit, Arok digambarkan sebagai putra yang lahir antara manusia dan dewa. Namun, sejumlah sejarawan menafsirkan bahwa Arok sejatinya adalah rakyat biasa yang kemudian dicatat sebagai putra dewa untuk melegitimasi kenaikannya ke tampuk kekuasaan sebagai sesuatu yang tak terelakkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di samping itu, mengingat pentingnya status dan otoritas raja dalam struktur masyarakat

¹ *Mata Pusaran* tidak diterbitkan karena tidak diketahui keberadaan naskahnya.

kuno, terdapat pula penafsiran yang menyatakan bahwa Arok dipandang sebagai putra seorang penguasa agar memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat (Koh Young-hun 2004, 9-10). Dalam wacana mengenai perebutan kekuasaan dan moralitas, Arok kerap diposisikan sebagai sosok yang berhasil naik takhta melalui kudeta, bukan berdasarkan garis keturunan maupun keutamaan moral. Hal ini memicu perdebatan yang terus berlangsung terkait legitimasi dan moralitas tindakannya. Dalam buku-buku teks sejarah Indonesia, misalnya, Arok kerap digambarkan sebagai tokoh yang memperoleh kekuasaan melalui cara-cara yang dipandang negatif, seperti pencurian keris dan perencanaan pembunuhan untuk merebut istri sang penguasa. Sebagai contoh, dalam buku teks *Sejarah Nasional Indonesia* untuk kelas 4 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Ken Arok digambarkan sebagai putra dewa Hindu yang dibesarkan oleh seorang pencuri. Dalam perkembangannya, Arok kemudian menjadi bawahan Tunggul Ametung, Akuwu wilayah Tumapel pada masa itu. Dikisahkan bahwa Arok jatuh cinta kepada istri Tunggul Ametung, Ken Dedes, sejak pandangan pertama. Demi mendapatkan Ken Dedes, Arok merencanakan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung dengan menggunakan keris buatan Mpu Gandring. Dalam proses ini, Arok berhasil lolos dari hukuman dengan menjebak temannya, Kebo Ijo, sebagai pelaku kejahatan tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan Tunggul Ametung, Arok memperistri Ken Dedes, menguasai Tumapel, dan akhirnya menaklukkan Kerajaan Kediri dan mendirikan Kerajaan Singasari [7, hlm.397-398].

Melalui hal ini dapat diketahui bahwa ambiguitas latar belakang kelahiran Ken Arok, legitimasi atas perebutan kekuasaan yang dilakukan Arok, serta persoalan moralitas, telah menjadi isu sentral dalam berbagai kontroversi yang menyelubungi Arok. Namun, melalui *Arok Dedes*, Pramoedya berupaya mengungkap dan menafsirkan kembali kisah Arok yang sarat dengan muatan mitologis dan historis tersebut. Dalam prosesnya, Pramoedya menghadirkan sosok Arok yang sangat berbeda dari representasi dalam catatan sejarah konvensional, sehingga memunculkan kritik dari sejumlah kalangan yang menilai upaya tersebut sebagai bentuk distorsi terhadap sejarah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya kajian mendalam terhadap karakterisasi sastra Arok, terutama dalam konteks perbedaan antara catatan sejarah Arok yang telah beredar luas—yang merupakan perpaduan antara elemen sejarah dan mitologi—dengan rekonstruksi naratif yang dihadirkan dalam novel *Arok Dedes*. Secara khusus, kajian ini menitikberatkan pada bagaimana Arok digambarkan dalam novel sebagai seorang pemimpin yang memperoleh legitimasi melalui dukungan rakyat serta dihormati secara luas pada masanya. Representasi ini jelas menyimpang dari gambaran mitologis dan historis yang umumnya menempatkan Arok sebagai tokoh yang naik ke tampuk kekuasaan melalui intrik dan kekerasan. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana visualisasi tokoh Arok dikonstruksi dalam *Arok Dedes*, serta untuk mengkaji implikasi ideologis dan naratif

dari rekonstruksi tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pesan-pesan historis dan politis yang ingin disampaikan Pramoedya melalui reinterpretasi tokoh Arok.

Metodelogi

Secara umum, novel sejarah dapat didefinisikan sebagai genre naratif yang merekonstruksi tokoh maupun peristiwa historis dengan latar waktu tertentu di masa lampau [8, hlm. 20]. Berbeda dari novel fiksi murni, novel sejarah menggabungkan fakta sejarah dengan pendekatan sastra, sehingga tetap mempertahankan unsur imajinatif dalam proses penciptaannya. Oleh karena itu, meskipun berbasis pada realitas historis, novel sejarah tetap memiliki karakteristik fiksional sebagaimana novel pada umumnya. Ciri khas ini menjadikan novel sejarah lebih dari sekadar usaha menghidupkan kembali masa lalu; ia berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan yang relevan bagi pembaca masa kini. Nilai kesusastraan dari novel sejarah baru dapat dicapai apabila aspek historis yang diangkat mampu mendorong refleksi kritis terhadap kondisi kontemporer. Dengan kata lain, novel sejarah tidak seharusnya dipahami hanya sebagai dokumentasi nostalgia, melainkan sebagai hasil konstruksi ulang yang erat kaitannya dengan kesadaran dan isu-isu masa kini.

Berkaitan dengan hal tersebut, perspektif pengarang novel sejarah memainkan peran yang penting dalam menafsirkan dan merekonstruksi sejarah ke dalam bentuk sastra. Perspektif sang pengarang berfungsi sebagai kriteria untuk menentukan apa yang merupakan esensi di antara begitu banyak fakta Sejarah. Hal ini sejalan dengan konsep 'perspektif' yang dikemukakan oleh G. Lukács. Menurut Lukács, realitas merupakan gabungan antara unsur-unsur esensial dan non-esensial, dan tugas perspektif pengarang adalah membedakan keduanya untuk membentuk makna historis yang utuh. Lukács menegaskan bahwa representasi realitas tanpa keterlibatan perspektif pengarang hanya akan menghasilkan reproduksi dangkal yang menyerupai foto - menyalin kenyataan tanpa makna. Sebaliknya, perspektif pengarang diperlukan agar representasi tersebut dapat mencerminkan realitas secara mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, bagi Lukács, perspektif penulis merupakan elemen pokok dalam proses penciptaan karya sastra yang bermakna.

Ketika menerapkan pembahasan ini pada konteks novel sejarah, narasi yang tidak melibatkan sudut pandang penulis cenderung terbatas pada deskripsi kronologis belaka. Akibatnya, narasi semacam ini lebih menyerupai catatan sejarah daripada karya sastra. Dengan kata lain, pendekatan yang hanya mereproduksi fakta-fakta masa lalu tanpa interpretasi atau penekanan subjektif dari penulis membatasi kemampuannya untuk menghadirkan masa lalu sebagai sesuatu yang relevan dan bermakna bagi pembaca masa kini. Terkait hal ini, Lukács [5] menjelaskan sebagai berikut:

Tanpa adanya hubungan yang dirasakan dengan masa kini, penggambaran sejarah tidak mungkin dilakukan. Namun, dalam karya seni sejarah yang benar-benar agung, hubungan ini tidak terletak pada sekadar merujuk pada peristiwa-peristiwa kontemporer, melainkan pada upaya menghidupkan kembali masa lalu sebagai pra-sejarah dari masa kini—memberi kehidupan puitis pada kekuatan-kekuatan historis, sosial, dan kemanusiaan yang, melalui proses evolusi panjang, telah membentuk kehidupan kita saat ini sebagaimana adanya dan sebagaimana kita mengalaminya. (Lukács 1962, 53).

Oleh karena itu, bagi Lukács, novel sejarah yang sejati adalah karya yang mampu mengungkap hakikat masa lalu dalam kaitannya yang erat dengan kehidupan masa kini. Artinya, penulis novel sejarah tidak sekadar merekonstruksi peristiwa historis, melainkan menggunakan perspektif mereka untuk mengenali persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat masa kini, menelusuri akar historisnya dalam konteks zaman tertentu, lalu mengisihkannya melalui medium sastra yang imajinatif. Melalui pendekatan ini, novel sejarah berperan sebagai ruang reflektif yang memanfaatkan masa lalu untuk menerangi kondisi masa kini dan, pada akhirnya, menawarkan arah bagi pencarian masa depan yang lebih baik.

Dalam kerangka ini, novel sejarah berangkat dari kesadaran penulis terhadap realitas kontemporer, memanfaatkan sejarah sebagai medium untuk mengungkap esensi persoalan masa kini, dan menyusun narasi yang secara imajinatif merespons tantangan tersebut. Oleh karena itu, fokus utama dalam analisis novel sejarah tidak semata-mata terletak pada verifikasi fakta historis atau akurasi representasi masa lalu, melainkan pada cara pandang penulis dalam memilih, menafsirkan, dan merekonstruksi tokoh maupun peristiwa sejarah. Hal yang lebih penting adalah isu-isu apa yang hendak disampaikan melalui proses tersebut.

Dengan demikian, novel sejarah harus dipahami sebagai genre sastra yang mengajak pembaca untuk merefleksikan masa kini melalui lensa masa lalu. Oleh sebab itu, analisis terhadap novel sejarah seharusnya mempertimbangkan secara kritis persepsi penulis terhadap realitas, strategi naratif yang digunakan, serta peran imajinasi sastra dalam membentuk makna historis.

Citra Arok dalam *Arok Dedes*

1. Dari ‘Temu’ ke ‘Arok’

Dalam novel *Arok Dedes*, tokoh Arok digambarkan sebagai anak yatim piatu dengan asal-usul yang tidak jelas, yang diasuh oleh seorang petani bernama Lembung. Ia mengawali hidupnya sebagai anggota kasta Sudra—kasta terendah dalam tatanan sosial masyarakat saat itu—dengan nama *Temu*. Sejak kecil, Temu membantu ayah angkatnya di ladang dan tumbuh menjadi anak laki-laki yang cekatan, tangguh, dan kuat. Yang patut dicermati dalam penokohan Temu adalah kecenderungannya sejak dini untuk menentang ketidakadilan. Narasi tentang masa pertumbuhannya disusun sedemikian

rupa sehingga ia tampil sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mewujudkan keadilan.

Salah satu momen penting dalam perkembangan karakter Temu terjadi ketika ia berusia tiga belas tahun dan memutuskan meninggalkan rumah Lembung untuk memulai pengembaraan pertamanya. Dalam perjalanannya, ia menyaksikan seorang tentara Tumapel membobol rumah warga dan secara paksa mengambil seekor kambing. Peristiwa ini menjadi titik awal dari tindakan perlawanan konkret Temu terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan ketidakadilan sosial. Ketika melihat seorang anak menangis karena kehilangan kambingnya akibat ulah prajurit tersebut, Temu merasa marah dan segera bertindak—mengejar prajurit itu, merebut kembali kambing yang dicuri, dan mengembalikannya kepada anak tersebut. Adegan ini memiliki makna simbolis yang kuat karena menunjukkan untuk pertama kalinya bagaimana rasa keadilan dan empati Temu terhadap kaum lemah diwujudkan melalui tindakan nyata. Dengan demikian, momen ini tidak hanya menandai munculnya kesadaran moral Temu, tetapi juga menggambarkan awal pembentukan jati diri tokoh utama sebagai agen perubahan yang berpihak pada keadilan sosial.

Hatinya berontak melihat pemandangan itu. Dihiburnya anak itu, dan dijanjikan padanya: “Nanti aku bawakan kambing untukmu,” Dicurinya seekor anak kambing dan diantarkannya kepada bocah itu. Ia mendapatkan kebahagiaan dengan perbuatan itu [10, hlm. 93].

Menarik untuk dicermati bahwa, sebagaimana diungkapkan dalam narasi, “*ia mendapatkan kebahagiaan dengan perbuatan itu*”, tindakan Temu tidak hanya merefleksikan tindakan etis terhadap sesama, tetapi juga terkait erat dengan pemenuhan batiniah sebagai subjek moral. Kebahagiaan yang dirasakannya bukanlah kenikmatan instan, melainkan kepuasan mendalam yang muncul dari keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakininya benar—yaitu perlawanan sukarela terhadap kekuasaan sewenang-wenang, seperti yang tergambar dalam aksi perebutan kembali kambing dari tentara Tumapel. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam perkembangan naratif, yang menandai awal proses pembentukan Temu sebagai tokoh yang melawan ketidakadilan sosial secara nyata. Dari momen inilah mulai terbentuk proyeksi karakter Temu di masa depan sebagai Arok, tokoh yang kelak memainkan peran sentral dalam mengguncang tatanan kekuasaan. Setelah kejadian tersebut, Temu semakin aktif menunjukkan keberpihakannya kepada kaum tertindas dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh konkret lainnya adalah ketika Temu menyaksikan empat prajurit menyeret seorang gadis ke hutan. Bersama teman-temannya, ia berhasil mencegat dan menyelamatkan gadis tersebut. Tak hanya itu, ia juga memimpin gerakan kolektif untuk menolak tirani kekuasaan, seperti memprakarsai pengalihan upeti kepada Kerajaan Kediri bersama anak-anak desa—sebuah tindakan yang, meskipun berakhir gagal, mempertegas komitmennya terhadap keadilan.

Rangkaian tindakan ini menjadi fondasi alur naratif yang menggambarkan proses transformasi Temu menjadi subjek keadilan. Ia tumbuh melalui praktik nyata melawan ketidakadilan dan memperlihatkan solidaritas yang kuat terhadap kelompok-kelompok yang lemah dan tertindas. Dengan demikian, karakter Temu dibangun bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tetapi juga sebagai figur etis yang merepresentasikan harapan akan lahirnya keadilan sosial dari bawah.

Kesadaran Temu akan realitas penindasan sosial yang bersifat struktural terbentuk dari pengalamannya sebagai pemuda yang menyaksikan langsung berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh otoritas Tumapel dan kekuasaan represif Kerajaan Kediri terhadap kelompok-kelompok rentan. Dalam konteks ini, Raja Kediri menunjuk Tunggul Ametung—seorang Sudra—sebagai penguasa Tumapel, dengan syarat bahwa ia wajib membayar upeti dalam jumlah tertentu sebagai bentuk loyalitas politik. Untuk memenuhi tuntutan ini, Tunggul Ametung tidak hanya merampas kekayaan rakyat, tetapi juga menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Ia menjalankan kekuasaan secara tirani, melalui tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan praktik perbudakan.

Di sisi lain, Kerajaan Kediri yang mengikuti kepercayaan Hindu Wisnu melakukan tindakan-tindakan terhadap penganut yang tidak seagama seperti Buddha dan Hindu Siwa. Penganut Buddha dan Hindu Siwa dilarang untuk melakukan pertemuan-pertemuan keagamaan, harta benda mereka disita, dan kuil-kuil mereka dihancurkan. Dalam situasi penindasan seperti inilah Temu menyaksikan penderitaan rakyat dan mulai mengambil sikap perlawanan. Kesadaran tersebut kemudian ia transformasikan menjadi aksi kolektif yang lebih terorganisir. Salah satu bentuk perlawanan konkret yang ia lakukan adalah menyusun rencana strategis untuk merampas upeti yang akan dikirimkan kepada Raja Kediri dan mendistribusikannya kembali kepada rakyat. Tindakan ini merupakan titik balik penting yang menunjukkan proses pembentukan identitas Temu sebagai pemimpin yang berorientasi pada keadilan sosial dan cita-cita pembaruan tatanan kekuasaan. Dengan demikian, Temu tidak hanya bertindak sebagai subjek etis, tetapi juga sebagai aktor politik yang secara aktif menentang ketidakadilan dan memperjuangkan perubahan sosial.

Pramoedya menyoroti sikap perlawanan praktis yang diperlihatkan oleh Temu dengan cara membandingkannya secara kritis dengan kaum Brahmana Siwa, kelompok elite agama di wilayah Tumapel. Pada masa itu, kaum Brahmana Siwa telah mengalami penindasan selama kurang lebih dua abad di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri, yang mengangkat pemujaan Wisnu sebagai agama utama mereka. Akibatnya, posisi sosial dan keagamaan kaum Brahmana Siwa terdesak ke pinggiran dalam struktur politik yang mengandalkan legitimasi religius dari ajaran Wisnu. Dalam konteks represi ini, Lohgawe—guru Arok—terus mengadakan pertemuan rahasia di antara para Brahmana sebagai upaya untuk mengembalikan supremasi ajaran Siwa. Temu turut menghadiri

pertemuan-pertemuan tersebut dan menjadi saksi atas dinamika internal yang mencerminkan keterpecahan serta kelemahan kaum Brahmana. Dari pengamatannya, Temu mulai menyadari keterbatasan mendasar yang melekat dalam sikap para Brahmana Siwa, yaitu kecenderungan mereka untuk bersikap pasif. Meskipun mereka terus mengecam dominasi Kerajaan Kediri—yang mengklaim diri sebagai inkarnasi Wisnu dan menggunakan legitimasi keagamaan sebagai dasar kekuasaan politik—kritik mereka tidak pernah diwujudkan dalam bentuk perlawanan konkret. Penolakan terhadap ketidakadilan hanya terbatas pada keluhan dan tuduhan yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan rahasia. Menyadari kelemahan ini, Temu dengan berani menyampaikan kritiknya terhadap sikap pasif kaum Brahmana Siwa kepada gurunya sendiri, Lohgawe. Ia mengungkapkan pandangannya dengan nada yang tegas dan berani, menekankan perlunya tindakan nyata sebagai bentuk resistensi terhadap penindasan, bukan sekadar retorika dalam ruang tertutup.

“Tak seorang pun pernah berniat menghadap Sri Baginda Kretajaya untuk mempersembahkan pendapatnya. Kaum brahmana itu sendiri yang sebenarnya tak punya keberanian, mereka ketakutan dan justru ketakutan sebelum berbuat, ketakutan untuk berbuat itu yang menyebabkan para brahmana telah kehilangan kedudukannya selama dua ratus tahun ini. Apa sebabnya ketakutan, Bapa Mahaguru? Bukankah itu juga pendapat sendiri? Dan apalah artinya mengetahui, berpendapat, kemudian takut kepadanya? Lihatlah, ini murid Bapa sudah berbicara.” [10, hlm. 66-67].

Melalui pernyataannya yang langsung dan terbuka kepada gurunya, Temu mengungkapkan kritik tajam terhadap sikap kaum Brahmana Siwa. Ia menyoroti bahwa meskipun kaum Brahmana menyadari bentuk-bentuk penindasan tidak adil yang dilakukan oleh Kerajaan Kediri, mereka cenderung menghindari perlawanan nyata dan hanya terbatas pada penyampaian kritik serta keluhan semata. Secara khusus, Temu menunjukkan kesadaran kritis bahwa *pengetahuan* dan *pendapat* yang tidak diwujudkan dalam tindakan justru dapat menjadi sumber ketakutan. Ketakutan inilah, menurutnya, yang menumbuhkan rasa tidak berdaya dan memperpanjang keterpinggiran sosial para Brahmana Siwa. Ia menegaskan bahwa ketakutan untuk bertindak merupakan akar kemunduran panjang kaum Brahmana Siwa, dan bahwa perubahan hanya mungkin dicapai melalui tindakan nyata yang didorong oleh keberanian. Pernyataannya tidak hanya mengecam kepasifan kelas intelektual elite, tetapi juga menandai transformasi pribadinya: dari seorang pengikut menjadi seorang aktor yang berani mengambil tanggung jawab dan menunjukkan kualitas kepemimpinan.

Menanggapi keberanian dan ketajaman pandangan Temu, Lohgawe melihat dalam dirinya semangat perubahan dan rasa tanggung jawab sosial yang luar biasa. Ia menilai bahwa Temu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan zaman menuju pembaruan. Sebagai bentuk pengakuan atas transisi identitas dan kedewasaan moral Temu, Lohgawe memberinya nama baru: *Arok*.

“Yang kudengar bukan lagi keluar dari mulut seorang calon brahmana. Itu lebih patut diucapkan oleh seorang calon raja, di medan perang, di medan tikai, kemudian di atas singgasana. (...) Tidak sia-sia kuberikan ilmu padamu. Kaulah harapan bagi semua brahmana.” Ia buka tangan dari mulut muridnya, melepas destar pemuda itu, mencium ubun-ubunnya. “Dengan api Hyang Bathara Guru dalam dadamu, dengan ketajaman parasyu Hyang Ganesya, dengan keperkasaan Hyang Durga Mahisasuramardini, kaulah Arok, kaulah pembangun ajaran, pembangun negeri sekaligus” [10, hlm. 68].

Adegan ini merupakan pernyataan resmi dari Guru Lohgawe bahwa Arok memiliki kualitas seorang pemimpin sejati. Saat ini, nama ‘Arok’ yang diberikan Lohgawe berfungsi sebagai nama simbolis yang berarti ‘pembangun’ atau ‘pendiri.’ Dalam adegan saat Lohgawe memberikan nama ‘Arok’ kepada Temu, Pramoedya menjelaskan dalam catatan kaki bahwa makna nama ini adalah ‘pembangun’. Dengan demikian, penamaan ini ditafsirkan sebagai perangkat naratif yang memberi bayangan bahwa Arok akan membentuk suatu tatanan politik baru dan menempatkan dirinya sebagai tokoh yang akan memimpin perubahan sosial. Selain itu, sifat-sifat kedewaan yang disebutkan Lohgawe saat pengesahan Temu sebagai Arok, yaitu keberanian Hyang Bhatara Guru, ketajaman Ganesa, dan keagungan Durga, melambangkan kualitas-kualitas mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan mengadopsi sifat-sifat tersebut sebagai kualitas pemimpin masa kini, Pramoedya menegaskan bahwa pemimpin bukanlah sosok yang memiliki kekuasaan, melainkan sosok yang harus memiliki keberanian dan kekritisannya dalam menghadapi ketidakadilan, memiliki kebijaksanaan bagi masyarakat, dan memiliki martabat moral agar mampu memangku kewenangan sosial.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu isu sentral yang dibahas dalam novel sejarah adalah ‘sudut pandang’ pengarang yang memberikan makna pada tokoh atau peristiwa sejarah tertentu. Sebab, hakikat novel sejarah bukanlah sekadar reproduksi masa lalu, melainkan genre naratif yang menafsirkan dan merekonstruksi masa lalu berdasarkan kesadaran masa kini terhadap berbagai isu. Dengan kata lain, tidak seperti catatan sejarah, novel sejarah berusaha memberi makna khusus pada peristiwa dan tokoh sejarah melalui sudut pandang dan pilihan naratif pengarang. Dalam proses ini, pengarang menyajikan perspektif baru tentang sejarah dengan melengkapi kesenjangan sejarah dengan imajinasi atau merekonstruksi interpretasi yang ada secara kritis. Pada saat ini, penokohan dalam novel sejarah dapat dipahami sebagai tindakan interpretasi penting yang mencerminkan sudut pandang pengarang. Dalam hal ini, D. Daiches [1] menjelaskan bahwa seorang pengarang novel sejarah tidak semata-mata meniru atau mencatat rangkaian peristiwa historis sebagaimana adanya, melainkan mengekstraksi unsur-unsur yang bersifat khas dan universal dari peristiwa atau tokoh-tokoh tersebut. Melalui proses ini, penulis dapat menyoroti makna mendasar dari suatu situasi atau peristiwa tertentu. Dengan demikian, novelis sejarah mampu mengungkap hakikat historis dari suatu peristiwa, terlepas dari apakah peristiwa tersebut benar-benar terjadi atau tidak [1, hlm 37]. Dalam konteks ini, penting untuk

dicermati bahwa dalam proses rekonstruksi tokoh Arok—yang merupakan figur historis—Pramoedya menambahkan unsur imajinasi sastra melalui penciptaan nama masa kecil *Temu* serta narasi tentang fase pertumbuhannya, yang tidak ditemukan dalam dokumen sejarah manapun. Rekonstruksi naratif semacam ini tidak dapat dianggap sekadar sebagai perangkat fiktif untuk meningkatkan daya tarik cerita.

Pertama, dalam masyarakat tradisional Jawa, nama masa kecil Arok, 'Temu', diberikan kepada anak-anak yang tidak jelas kelahirannya karena mereka sering ditemukan di pinggir jalan, di pasar, atau di kuburan [6, hlm. 161]. Karenanya, nama masa kecil Arok dalam karya tersebut berfungsi sebagai perangkat narasi yang melambangkan bahwa ia bukan dari garis keturunan dewa atau asal usul bangsawan, melainkan seorang yatim piatu biasa yang ditemukan secara kebetulan. Lebih jauh, latar ini menegaskan bahwa Arok dalam novel tersebut merupakan seorang subjek yang tidak bersandar pada garis keturunan atau takdir, tetapi membentuk jati dirinya sendiri dan tumbuh dalam realitas yang tidak adil. Dengan kata lain, Arok direkonstruksi sebagai tokoh yang tanggap terhadap ketidakadilan zaman dan menapaki jalan hidupnya sendiri sebagai seorang yatim piatu keturunan rakyat jelata. Ini merupakan metode rekonstruksi Pramoedya yang berbeda dari sumber-sumber yang ada yang memitologikan Arok, dan dapat dikatakan sebagai strategi naratif yang dimaksudkan untuk menekankan proses memulai dari kelas sosial rendah dan tumbuh menjadi pemimpin melalui aksi nyata dan bekal wawasan.

Selain itu, Arok di masa kecil, yang muncul dengan nama 'Temu', digambarkan sebagai sosok yang bereaksi secara sensitif terhadap penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan, serta memiliki kepekaan untuk mengatasinya. Melalui narasi dan penggambaran pertumbuhan Arok ini, Pramoedya menyoroti bahwa kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin terbentuk berdasarkan kepekaan moral dan kemampuan mengambil tindakan. Citra Arok ini khususnya tampak jelas kontras dengan golongan Brahmana Siwa. Dengan kata lain, Arok tidak hanya secara kritis mengakui tirani kekuasaan yang tidak adil saat itu, tetapi juga menunjukkan keinginan untuk melampaui sifat pasif kaum elite agama. Melalui ini, Pramoedya menegaskan bahwa tanggung jawab intelektual dan pemimpin sejati terletak pada keberanian mengambil tindakan nyata.

Dengan demikian, narasi pertumbuhan dari *Temu* menuju *Arok* berfungsi sebagai perangkat naratif untuk mengungkap proses pembentukan karakter seorang pemimpin. Melalui alur ini, Pramoedya ingin menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah kualitas yang ditentukan secara otomatis oleh garis keturunan, latar sosial, atau nasib, melainkan sesuatu yang dibentuk melalui keterlibatan aktif individu dalam menghadapi dan mengatasi penderitaan serta konflik dalam tatanan realitas yang tidak adil. Transformasi *Temu* menjadi *Arok* menjadi simbol dari proses subjektivasi seorang pemimpin—yakni individu yang tidak hanya menyadari ketimpangan sosial, tetapi juga

memilih untuk bertindak melawannya secara konkret. Melalui narasi pertumbuhan ini, Pramoedya merumuskan fondasi kepemimpinan yang berpijak pada pengalaman langsung terhadap ketidakadilan, keberanian moral untuk bertindak, serta solidaritas dengan kelompok tertindas. Dengan kata lain, *Arok Dedes* bukan hanya sebuah kisah sejarah yang direkonstruksi secara imajinatif, tetapi juga manifestasi visi Pramoedya tentang bagaimana pemimpin sejati seharusnya lahir—bukan dari garis keturunan, tetapi dari kesadaran dan perjuangan.

2. Arok: Pemimpin ‘Toleran’ dan ‘Pemersatu’

Dalam *Arok Dedes*, Arok digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mampu merangkul keberagaman dan berorientasi pada integrasi sosial, yang lebih mengandalkan pengetahuan dan pendidikan daripada kekerasan sebagai sarana perubahan. Salah satu aspek utama dari kepemimpinannya adalah kemampuannya memahami kompleksitas keberagaman agama yang mengakar dalam masyarakat pada masa itu. Melalui minat intelektual terhadap sejarah dan doktrin keagamaan, Arok membangun sikap yang terbuka dan penuh pengertian terhadap berbagai keyakinan agama yang ada. Sikap toleran ini kemudian menjadi landasan penting dalam upayanya membangun integrasi sosial yang harmonis.

Latar cerita *Arok Dedes*, yaitu Tumapel dan Kerajaan Kediri, digambarkan sebagai ruang sosial multireligius yang dihuni oleh penganut berbagai kepercayaan seperti Siwaisme, Wisnuisme, dan Buddhisme. Dalam konteks ini, Arok secara bertahap memperluas wawasan keagamaannya dengan mempelajari dan memahami masing-masing agama tersebut. Minat seriusnya terhadap agama bermula ketika ayah angkat keduanya, Ki Bango, menitipkannya kepada guru Buddha bernama Tantripala. Di bawah bimbingan Tantripala, Arok mempelajari doktrin-doktrin dasar Buddhisme, yang menjadi fondasi awal kesadaran keagamaannya. Selanjutnya, ia mendalami ajaran Siwaisme melalui guru barunya, Dang Hyang Lohgawe, seorang Brahmana Siwa. Pendidikan keagamaan yang dijalani Arok tidak berhenti pada akumulasi pengetahuan doktrinal, melainkan berkembang menjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik antara Hindu Siwa dan Hindu Wisnu, serta konteks historis yang melatarbelakanginya. Dengan pemahaman yang kritis inilah, Arok membangun karakter kepemimpinan yang merangkul keberagaman dan berupaya membangun persatuan dalam masyarakat yang terfragmentasi secara religius.

Melalui pemahaman agama ini, Arok tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, yang melampaui kaum Brahmana, kaum elite agama saat itu, tetapi juga memperoleh pengakuan dan kepercayaan yang besar dari kaum Brahmana. Hal ini memiliki implikasi sosial yang penting dalam struktur sosial saat itu, di mana agama, kelas, dan kekuasaan saling terkait erat. Pada saat itu, mayoritas rakyat jelata beragama Hindu Wisnu, sedangkan kelas Brahmana, yang merupakan kasta

tinggi di masyarakat, didominasi oleh Hindu Siwa. Sementara itu, kelas penguasa yang memegang kekuasaan politik terpusat di sekitar para penganut Wisnu, yang terus menindas kelompok Brahmana Siwa yang secara jumlah dan kekuatan politik telah melemah. Dalam struktur agama dan kelas yang kompleks ini, tidaklah mudah bagi Arok, yang tumbuh sebagai rakyat jelata di bawah asuhan seorang ayah angkat penganut Wisnu, untuk memperoleh kepercayaan para Brahmana Siwa. Arok berhasil mendapatkan kepercayaan dari kaum brahmana karena memiliki pemahaman yang mendalam tentang doktrin Siwa serta menerima posisi keagamaan mereka.

Toleransi dan pemahaman agama Arok ini berperan penting dalam meredakan konflik antar-agama dan membangun landasan koeksistensi dalam struktur sosial multiagama. Hal ini terungkap jelas dalam pidato yang disampaikan Arok kepada rakyat setelah ia melengserkan si Tunggul Ametung dari kekuasaan. Dalam pidato tersebut, Arok menegaskan bahwa nilai-nilai dari berbagai ajaran agama telah menyatu secara harmonis dalam dirinya. Ia mengartikulasikan visi kepemimpinan yang berbasis pada integrasi, dengan menjadikan konsep *dharma* sebagai prinsip dasar bagi tatanan sosial baru yang menjamin kehidupan berdampingan antaragama.

“Kalian lihat, aku adalah seorang Syiwa, istriku, Umang, orang Wisynu, bapa angkatku, Bango Samparan dan Ki Lembung juga orang Wisynu, guruku, Yang Terhormat Tantripala adalah Buddha, mahaguruku, Yang Suci Dang Hyang Lohgawe adalah Syiwa. Aturan-aturan yang baik selama dua ratus tahun ini adalah karunia raja Wisynu, Sri Erlangga. Yang jadi ukuran baik tidaknya seseorang bukan bagaimana menyembah para dewa, tapi dharma pada sesamanya,” [10, hlm.547].

Berdasarkan pemahaman mendalamnya terhadap ajaran Hindu dan Buddha, Arok menyadari bahwa konsep *dharma* merupakan nilai fundamental yang dianut oleh kedua tradisi keagamaan tersebut. Atas dasar itu, ia mengajukan *dharma* sebagai landasan etika bersama yang dapat dijadikan pijakan moral bagi seluruh anggota masyarakat, terlepas dari afiliasi agama mereka. Dengan demikian, Arok memanfaatkan *dharma* sebagai prinsip integratif yang memungkinkan terwujudnya kerukunan dan kohesi sosial di tengah kondisi pluralistik Kerajaan Tumapel, di mana berbagai agama hidup berdampingan. Melalui pendekatan ini, Arok tidak hanya menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman religius, tetapi juga mengangkat nilai-nilai inti ajaran agama ke dalam tataran etika sosial yang bersifat universal. Ia membentuk norma-norma baru yang melampaui perbedaan agama dan merumuskan arah pembangunan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, Arok dapat dinilai sebagai pemimpin yang mengangkat ajaran-ajaran hakiki agama ke tataran etika sosial dan membangun norma-norma baru bagi masyarakat.

Sementara itu, kepemimpinan Arok yang berlandaskan ‘ilmu’ dan ‘wawasan’ tidak berhenti pada upaya mewujudkan kerukunan umat beragama di masyarakat saja. Melalui penelusuran sejarah, ia menyadari realitas golongan ‘Paria’ yang menempati

posisi terbawah dalam masyarakat pada saat itu. Golongan Paria adalah kelompok yang disebut ‘golongan tak tersentuh(untouchables)’ yang hidup di luar sistem kasta Hindu. Mereka berada pada status yang lebih rendah daripada Sudra, dan terutama melakukan pekerjaan seperti menangani mayat dan mengumpulkan sampah, dan sepenuhnya dikucilkan dari masyarakat. Melalui penelitian sejarah, Arok menyadari bahwa golongan ini bukanlah suatu tatanan status yang tetap dan tidak dapat berubah, tetapi suatu produk sosial yang dibentuk sesuai dengan kepentingan kelompok kekuasaan tertentu. Artinya, ia menegaskan melalui penelusuran sejarah bahwa pada masa pemerintahan Raja Sri Erlangga, golongan Paria resmi dihapuskan dan hanya kasta-kasta utama (dari Brahmana sampai Sudra) yang dipertahankan. Faktanya, kelas Paria menghilang dari Jawa selama sekitar dua ratus tahun setelah Raja Sri Erlangga menyatakan penghapusan perbudakan. Namun, keturunan kelima Kerajaan Kediri, Raja Kretajaya, memberlakukan kembali kasta Paria sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan politik dari kasta Brahmana. Akibatnya, perbudakan muncul kembali dan sistem penindasan semakin diperkuat. Penindasan ini terutama merajalela pada masa Tunggul Ametung berkuasa, dan ia memperbudak rakyat jelata yang tidak mampu membayar pajak atau melunasi utang. Dalam situasi ini, Arok memahami realitas struktur penindasan dan perbudakan yang terbentuk melalui kolusi antara kekuasaan dan agama, dan menyadari perlunya keadilan sosial baru untuk mengatasinya. Ia mengkonkretkan kesadarannya melalui tindakan nyata, seperti menyelamatkan ayah angkatnya yang telah dijual sebagai budak dan membebaskan budak yang dipenjara di tambang emas rahasia Tunggul Ametung. Begitu ia menggulingkan Tunggul Ametung dan naik tahta, ia mewarisi jejak Raja Sri Erlangga dan menyatakan penghapusan kelas Paria dan perbudakan.

“Dengarlah aku berjanji, sebagai Akuwu Tumapel perbudakan tidak akan diadakan lagi, aku lawan dan aku hapuskan. Dengan bantuan semua kalian akan kutumpas kejahatan dalam bentuk dan cara apapun. Aku tidak akan menghaki milik kalian, juga tidak akan merampas apa pun dari siapa pun,” [10, hlm. 550].

Seperti terlihat dalam kutipan di atas, Arok dengan jelas memperlihatkan orientasi politik dan etikanya untuk membangun tatanan masyarakat berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Pernyataan Arok ini menjadi istimewa bila dikaitkan dengan Magna Charta yang disebutkan Pramoedya dalam kata pengantar *Arok Dedes*. Dalam kata pengantar novel ini, Pramoedya mengibaratkan penghapusan perbudakan yang dilakukan Raja Sri Erlangga dengan Magna Carta yang dikeluarkan Raja John dari Inggris pada tahun 1215, dan mengemukakan bahwa apa yang disebut ‘Magna Charta Jawa’ itu telah dirusak oleh pemberlakuan kembali perbudakan pada masa pemerintahan Kretajaya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sosok yang kembali menghapus penyimpangan ini adalah Arok. Kata pengantar ini menunjukkan bahwa Pramoedya berusaha merekonstruksi Arok sebagai pemimpin yang akan memulihkan keadilan dan kesetaraan sosial.

Demikian, Arok dalam *Arok Dedes* digambarkan sebagai tokoh yang menghadapi masalah struktural masyarakat seperti konflik agama dan kesenjangan kelas, dan mengenali masalah ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis, dan menawarkan perbaikan ke arah integrasi. Kepemimpinannya didasarkan pada ilmu pengetahuan dan wawasan sejarah, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu merangkul keberagaman dengan memulihkan tatanan keadilan dan kesetaraan. Penggambaran Arok dan orientasi kepemimpinannya tersebut sesuai dengan persepsi Pramoedya tentang realitas, yang dapat dipahami sebagai pesan pengarang, bahwa kepemimpinan yang mewujudkan persatuan dengan berlandaskan sikap saling merangkul sangat diperlukan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Masyarakat Tumapel dalam karya ini memiliki struktur sosial yang majemuk, di mana berbagai suku, agama, dan golongan hidup berdampingan, sehingga memperlihatkan aspek-aspek yang mirip dengan masyarakat Indonesia modern. Pramoedya melalui *Arok Dedes* menegaskan, dalam masyarakat Indonesia yang plural, yang terpenting adalah nilai toleransi untuk dapat merangkul keberagaman dan nilai persatuan. Untuk menjaga nilai-nilai pokok ini, diperlukan sosok pemimpin yang mampu mewujudkan hal tersebut. Terkait hal ini, Pramoedya mengkritisi ketiadaan sosok ‘pemimpin berwawasan Indonesia’. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan berikut:

“Indonesia sampai sekarang nggak punya negarawan. Yang ada hanya pembesar-pembesar aja. Mereka nggak punya wawasan tentang Indonesia; bahkan geografi Indonesia pun nggak tahu barangkali. Ini sudah nggak beres...(...) Untuk menjadi negarawan di Indonesia diperlukan wawasan Indonesia, mengerti tentang Indonesia dan menjurus pada perspektif yang benar. Negarawan nggak tahu Indonesia itu kan aneh...” [9, hlm. 281,290].

‘Wawasan Indonesia’ yang ditekankan Pramoedya di sini berarti pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang sejarah, geografi, masyarakat, agama, dan budaya Indonesia. Lebih jelasnya, konsep ini mencakup kesadaran bahwa Indonesia adalah masyarakat multietnis dan multireligius, pemahaman bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis khas sebagai negara kepulauan, serta wawasan untuk mewujudkan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* di tengah masyarakat majemuk. Terutama, Pramoedya memandang bahwa *kesadaran sejarah* merupakan salah satu elemen kunci dari wawasan kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin Indonesia. Menurut pandangannya, pemimpin sejati adalah sosok yang memiliki kemampuan reflektif terhadap sejarah, sehingga dapat menarik pelajaran dari masa lalu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa kini maupun masa depan.

Dari sudut pandang ini, Pramoedya mengangkat contoh gerakan separatis di Aceh dan Papua sebagai ilustrasi kegagalan para pemimpin Indonesia dalam memahami sejarah. Ia mengkritik bahwa akar dari berbagai krisis nasional sesungguhnya terletak pada kurangnya kesadaran sejarah dalam kepemimpinan. Dalam kasus Aceh, misalnya, meskipun wilayah tersebut memberikan kontribusi besar dalam bentuk dukungan

finansial dan material selama masa perjuangan kemerdekaan dan revolusi, janji pemberian status “provinsi istimewa” serta otonomi berbasis hukum Islam yang pernah disampaikan oleh Presiden Sukarno tidak direalisasikan oleh rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Pemerintah pusat justru secara sepihak meleburkan Aceh ke dalam struktur nasional dengan mengatasnamakan prinsip “berbeda-beda tetapi tetap satu.” Kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Aceh atas tindakan ini pun kian meningkat, yang kemudian bermuara pada lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik ini ditanggapi pemerintah secara militeristik, yang ditandai oleh pengiriman pasukan ke wilayah tersebut. Akibatnya, konflik bersenjata berkepanjangan berlangsung selama hampir tiga dekade, menelan korban jiwa sekitar 15.000 orang [2].

Pramoedya menilai bahwa tragedi ini mencerminkan kegagalan negara untuk mengingat dan menghormati jasa-jasa historis rakyat Aceh. Ia menyoroti kecenderungan pemerintah pascakemerdekaan yang mewarisi pola kekuasaan kolonial Belanda—yakni mobilisasi elit Jawa untuk mengendalikan wilayah-wilayah lain secara represif. Lebih jauh, Pramoedya memperingatkan bahwa pengabaian terhadap keberagaman sejarah dan kontribusi daerah-daerah di Indonesia berpotensi memicu efek domino berupa tuntutan kemerdekaan serupa di berbagai wilayah, yang dapat membahayakan keutuhan nasional [9, hlm. 277-282]. Dalam konteks krisis ini, Pramoedya menegaskan mendesaknya kehadiran pemimpin yang memiliki wawasan keindonesiaan—yakni pemimpin yang mampu memahami, menghargai, dan mengintegrasikan realitas historis dan keberagaman masyarakat Indonesia ke dalam praksis kepemimpinan. Oleh karena itu, tokoh Arok dalam novel *Arok Dedes* dapat dibaca sebagai representasi sastra dari kritik terhadap ketiadaan pemimpin yang berpandangan kebangsaan, sekaligus sebagai artikulasi ideal Pramoedya tentang figur pemimpin ideal.

Kesimpulan

Arok, yang dikenal sebagai pendiri Kerajaan Singasari, merupakan tokoh sejarah yang kontroversial, terutama dalam hal asal-usul, cara memperoleh kekuasaan, dan moralitasnya. Dalam berbagai catatan sejarah tradisional, Arok kerap digambarkan memiliki latar belakang mistis sebagai putra seorang dewa Hindu, serta memperoleh kekuasaan melalui kudeta. Representasi semacam ini menempatkan Arok sebagai figur yang kerap dikaitkan dengan narasi perebutan kekuasaan yang penuh intrik dan kekerasan dalam imajinasi politik masyarakat Indonesia. Namun, dalam novel *Arok Dedes*, Pramoedya merekonstruksi sosok Arok dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyajikan Arok sebagai subjek yang kompleks, yang berkembang melalui pengalaman menghadapi ketidakadilan sosial, dan pada akhirnya tampil sebagai tokoh transformatif. Pendekatan ini memunculkan kritik dari sebagian kalangan yang menilai karya tersebut sebagai bentuk penyimpangan atau pemutarbalikan sejarah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakterisasi sastra terhadap tokoh Arok dalam *Arok Dedes* serta implikasi ideologisnya,

dengan memperhatikan perbedaan antara narasi historis konvensional dan rekonstruksi sastra yang ditawarkan Pramoedya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam novel *Arok Dedes*, Pramoedya merekonstruksi sosok Arok secara signifikan berbeda dari narasi sejarah konvensional yang menggambarkan sebagai figur mitologis—putra dewa yang merebut kekuasaan melalui cara-cara yang tidak sah. Alih-alih mereproduksi narasi tersebut, Pramoedya menghadirkan Arok sebagai pemimpin yang membangun tatanan sosial baru dan mewujudkan integrasi masyarakat melalui kemampuannya dalam merespons serta mengoreksi ketidakadilan sosial secara aktif. Dalam rangka membangun representasi ini, Pramoedya menciptakan tokoh “Temu,” sebuah narasi fiktif tentang masa kanak-kanak Arok yang tidak ditemukan dalam sumber sejarah manapun. Melalui karakter Temu, Arok digambarkan sebagai anak dari kasta Sudra yang tumbuh dengan kesadaran moral dan keberpihakan terhadap kaum tertindas. Proses pertumbuhannya ditampilkan sebagai perjalanan menuju subjek yang memiliki kepekaan terhadap ketidakadilan serta keberanian untuk bertindak melawannya. Narasi transformatif dari Temu menjadi Arok berfungsi sebagai strategi naratif yang bertujuan menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan tidak bersumber dari legitimasi mitologis atau asal-usul luhur, melainkan dari pengalaman, kepekaan moral, dan keterlibatan dalam perjuangan melawan ketimpangan sosial. Dengan demikian, Pramoedya menyampaikan kritik tersirat terhadap paradigma kepemimpinan tradisional, sekaligus menawarkan visi alternatif tentang pemimpin ideal dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Selain itu, dalam *Arok Dedes*, Arok digambarkan sebagai figur pemimpin yang memiliki kemampuan untuk merangkul keberagaman dan membangun persatuan tanpa mengandalkan kekerasan, melainkan melalui pengetahuan, wawasan historis, dan pemahaman lintas-agama. Ketertarikannya terhadap berbagai ajaran agama membentuk sikap toleran terhadap perbedaan keyakinan. Lebih jauh, Arok ditampilkan sebagai sosok yang secara aktif merespons ketimpangan sosial dan hierarki kekuasaan yang terbentuk melalui kolusi antara otoritas politik dan agama. Ia menunjukkan keterbukaan terhadap kelompok Paria—golongan yang termarjinalkan dan dikeluarkan dari sistem kasta—dan mewarisi jejak Raja Sri Erlangga yang dikenal karena upayanya menghapus praktik perbudakan dan mendorong kesetaraan sosial. Melalui representasi ini, Pramoedya menegaskan bahwa kualitas inti seorang pemimpin dalam masyarakat yang kompleks dan majemuk adalah kemampuan untuk merangkul keragaman dan menciptakan persatuan. Dengan demikian, sosok Arok menyampaikan pesan tentang syarat-syarat kepemimpinan yang dibutuhkan dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang plural.

Dengan demikian, penggambaran tokoh Arok dalam *Arok Dedes* merefleksikan pemikiran kritis Pramoedya mengenai sosok pemimpin yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Representasi ini tidak dapat dipisahkan dari kesadarannya akan ketiadaan

pemimpin yang memiliki wawasan keindonesiaan sejak era kemerdekaan. Pramoedya menyadari bahwa persatuan nasional merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh bangsa Indonesia kontemporer. Atas dasar kesadaran tersebut, ia menaruh perhatian pada dinamika sejarah yang sarat dengan ketegangan antara integrasi dan disintegrasi, serta merekonstruksinya melalui sastra. Dengan meninjau kembali masa lalu dari perspektif masa kini, Pramoedya berupaya mengungkap secara kritis problematika kepemimpinan yang terus berulang dalam sejarah Indonesia. Ia secara sadar memilih sejarah tertentu yang memiliki relevansi dengan kondisi masa kini, dan mengubahnya menjadi ruang refleksi sastra terhadap realitas sosial masa kini. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Georg Lukács, yang menekankan bahwa novel sejarah tidak boleh berhenti pada reproduksi masa lalu secara factual saja, melainkan harus menyusun kembali sejarah dalam relasi yang erat dan bermakna dengan konteks masa kini.

Tahun 2025 merupakan tahun peringatan 100 tahun lahirnya Pramoedya. Untuk memperingatinya, Indonesia telah meluncurkan berbagai macam acara dan diskusi tentang karyanya lebih aktif dari sebelumnya. Dalam alur telaah ulang karya sastra Pramoedya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran pemimpin ideal dan pemikiran tentang kepemimpinan yang dipaparkan dalam novel sejarahnya *Arok Dedes* masih mempunyai implikasi bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Referensi

- [1] Daiches, D. (1974). *Critical approaches to literature*. Longman.
- [2] Djumala, D. (2013). *Soft power untuk Aceh: Resolusi konflik dan politik desentralisasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Koh, Young Hun. (2004). Aspek kesejarahan yang tersirat dalam *Arok Dedes*. *Jurnal Kajian Asia Tenggara*, 14(2), 3-39.
- [4] Koh, Young Hun. (2024). *The familiar stranger: The life and literature of Pramoedya*. HUiNE, Hankuk University of Foreign Studies.
- [5] Lukács, Georg. (1962). *The historical novel* (H. Mitchell & S. Mitchell, Trans.). Merlin Press.
- [6] Novita, Dewi (2005). *Power, leadership, and morality: A reading of Ken Arok's images in Indonesian literature and popular culture* (Doctoral dissertation). National University of Singapore.
- [7] Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1990). *Sejarah nasional Indonesia II*. Balai Pustaka.
- [8] Ryu, Jae Yeop (2002). *A study of modern Korean historical novels*. Kukhak Charyowon.
- [9] Sirait, P. H., et al. (2011). *Pram melawan!*. Nalar.
- [10] Toer, P. A. (2015). *Arok Dedes*. Lentera Dipantara.